

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Keberadaan layanan ini tidak hanya berfungsi untuk menyediakan dokumen identitas bagi setiap individu, melainkan juga sebagai instrumen penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak sipil, sosial, ekonomi, hingga politik warga negara. Dalam konteks Indonesia, dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, serta dokumen kependudukan lainnya memiliki kedudukan yang sangat vital. Tanpa dokumen tersebut, seorang warga negara akan mengalami kesulitan untuk mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, bantuan pemerintah, hingga hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Dengan kata lain, dokumen kependudukan merupakan pintu gerbang bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan dan kesejahteraan yang dijamin oleh negara.

Meski demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan akses layanan administrasi kependudukan, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Masyarakat di wilayah tersebut kerap menghadapi berbagai hambatan struktural maupun non-struktural dalam mengurus dokumen kependudukan. Hambatan struktural umumnya terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana, misalnya jarak yang jauh ke kantor pelayanan, hingga minimnya transportasi umum. Hambatan non-struktural dapat berupa rendahnya tingkat literasi administrasi masyarakat, kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengurusan dokumen, hingga faktor ekonomi yang membatasi kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan ke pusat layanan. Kondisi ini mengakibatkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan yang valid, sehingga berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Pemerintah, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), menyadari pentingnya melakukan terobosan untuk menjawab tantangan tersebut. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan adalah penerapan pelayanan langsung administrasi kependudukan. Pelayanan ini dirancang dengan konsep proaktif, yaitu petugas Disdukcapil mendatangi langsung lokasi-lokasi tertentu dengan membawa perangkat dan fasilitas layanan administrasi. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil yang mungkin berjarak cukup jauh, tetapi cukup hadir di titik layanan yang telah ditentukan di wilayah desa. Pendekatan ini terbukti lebih efisien

dalam menjangkau masyarakat, sekaligus meningkatkan kepedulian warga terhadap pentingnya dokumen kependudukan.

Program pelayanan administrasi kependudukan memiliki sejumlah manfaat yang signifikan. Pertama, mendekatkan layanan ke masyarakat sehingga menekan biaya, waktu, dan tenaga yang harus dikeluarkan warga. Kedua, meningkatkan inklusi kependudukan, karena masyarakat yang selama ini belum terdata atau belum memiliki dokumen resmi dapat segera terlayani. Ketiga, memperkuat peran negara dalam menjamin hak-hak dasar warga secara merata, tanpa membedakan kondisi geografis maupun sosial-ekonomi. Keempat, pelayanan administrasi kependudukan juga mendukung prinsip pemerintahan yang responsif dan adaptif, sejalan dengan tuntutan era digital dan pelayanan publik berbasis masyarakat. Meskipun memiliki manfaat besar, pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan juga memerlukan perencanaan yang matang, khususnya dalam penentuan lokasi pelayanan. Hal ini karena sumber daya seperti tenaga, waktu, serta anggaran yang tersedia tidaklah tak terbatas. Oleh sebab itu, penentuan lokasi optimal menjadi aspek yang krusial agar pelayanan benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Tanpa perencanaan lokasi yang tepat, kegiatan pelayanan administrasi kependudukan berpotensi kurang efektif, misalnya hanya melayani sebagian kecil warga atau justru tidak menjangkau kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas.

Dalam konteks Kabupaten Bogor, salah satu wilayah yang menghadapi tantangan tersebut adalah Kecamatan Nanggung. Kecamatan ini berada di bawah wilayah kerja UPT Disdukcapil Wilayah IV dan terdiri atas 11 desa. Karakteristik geografis Kecamatan Nanggung relatif kompleks, dengan kondisi alam berupa perbukitan, jalan akses yang sebagian masih terbatas, serta distribusi penduduk yang tersebar di beberapa desa. Situasi ini membuat sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan untuk mengurus dokumen kependudukan secara mandiri ke kantor Disdukcapil. Oleh karena itu, pelayanan administrasi kependudukan menjadi strategi yang sangat relevan untuk diterapkan di wilayah ini. Namun, dalam penerapannya, dibutuhkan kajian lebih lanjut mengenai desa mana yang sebaiknya dipilih sebagai lokasi pelayanan administrasi kependudukan agar kegiatan tersebut berjalan optimal. Pemilihan lokasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memperhitungkan sejumlah faktor, seperti jumlah penduduk, jarak, tingkat kebutuhan dokumen kependudukan, serta ketersediaan sarana pendukung. Dengan pendekatan yang tepat, lokasi yang dipilih akan mampu memberikan dampak maksimal dalam memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Tabel 1. 1 Jumlah lokasi/desa di Kecamatan Nanggung

NO	Lokasi / Desa	Jumlah Penduduk
1	Desa Malasari	9179
2	Desa Curugbitung	11710
3	Desa Cisarua	11569
4	Desa Bantarkaret	13103
5	Desa Hambaro	8246
6	Desa Kalongliud	10156
7	Desa Nanggung	8958
8	Desa Parakanmuncang	7965
9	Desa Pangkaljaya	8811
10	Desa Sukaluyu	7062
11	Desa Batu Tulis	8168

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bogor; dikutip dari Kabupaten Bogor, 2024

Urgensi penelitian mengenai penentuan lokasi optimal pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Nanggung semakin terasa penting ketika dikaitkan dengan tujuan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan merata hingga ke pelosok desa. Salah satu indikator keberhasilan adalah meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan sah, sehingga data kependudukan menjadi lebih akurat. Data ini nantinya juga akan sangat berguna sebagai dasar perencanaan pembangunan, distribusi bantuan sosial, maupun penyusunan kebijakan daerah.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diperlukan metode analisis yang sistematis, objektif, dan dapat memberikan hasil yang terukur dalam menentukan lokasi optimal. Salah satu metode yang relevan untuk digunakan adalah Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Metode ini mampu memberikan rekomendasi lokasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan alternatif terbaik yang mendekati solusi ideal. Dengan penerapan metode ini, diharapkan pemilihan lokasi pelayanan di Kecamatan Nanggung dapat dilakukan secara lebih akurat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis. Dengan demikian, penelitian mengenai penerapan metode TOPSIS dalam penentuan lokasi optimal pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Nanggung bukan hanya penting secara ilmiah, tetapi juga memiliki nilai manfaat langsung bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas akses

masyarakat terhadap dokumen kependudukan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Bogor.

B. Permasalahan

Penentuan lokasi pelayanan administrasi kependudukan yang optimal merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh UPT Disdukcapil Wilayah IV. Dengan wilayah kerja yang mencakup tujuh kecamatan terdapat berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan agar layanan dapat diberikan secara efektif dan efisien. Berikut adalah rincian masalah yang dihadapi :

1. Kondisi pemilihan lokasi/desa saat ini

Pemilihan lokasi pelayanan administrasi kependudukan di UPT Disdukcapil Wilayah IV saat ini masih bersifat subjektif, yaitu ditentukan langsung oleh Kepala UPT. Selain itu pemilihan Lokasi juga didasarkan pada usulan dari Desa kepada UPT Disdukcapil untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan.

2. Variasi Jumlah Penduduk

Setiap desa memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda. Misalnya, desa-desa di Kecamatan Leuwiliang yang relatif lebih dekat ke pusat kota mungkin memiliki populasi yang lebih besar dibandingkan desa-desa di Kecamatan Nanggung yang lebih terpencil. Variasi ini memengaruhi kebutuhan akan layanan administrasi kependudukan. Desa dengan jumlah penduduk besar membutuhkan frekuensi pelayanan yang lebih tinggi, sedangkan desa dengan populasi kecil tetapi terisolasi juga tidak boleh diabaikan.

3. Jarak yang bervariasi

Jarak dari kantor UPT di Kecamatan Leuwisadeng ke desa-desa di wilayah kerja sangat bervariasi. Ada desa yang berjarak hanya beberapa kilometer, tetapi ada pula yang mencapai puluhan kilometer. Jarak ini memengaruhi waktu tempuh, seperti bahan bakar kendaraan dan biaya transportasi. Selain itu, jarak yang jauh juga menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin mengakses layanan.

4. Keterbatasan Sumber Daya

UPT Disdukcapil Wilayah IV memiliki keterbatasan dalam hal jumlah petugas, kendaraan, dan anggaran operasional. Dengan sumber daya yang terbatas, tidak memungkinkan untuk mengadakan pelayanan administrasi kependudukan di setiap desa secara berkala. Oleh karena itu, pemilihan lokasi yang strategis menjadi krusial untuk memaksimalkan cakupan layanan dengan sumber daya yang ada.

5. Kebutuhan untuk memaksimalkan cakupan layanan

Tujuan utama pelayanan administrasi kependudukan adalah menjangkau sebanyak mungkin penduduk yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan. Namun, tanpa analisis yang tepat, lokasi yang dipilih mungkin tidak mencakup area dengan kepadatan penduduk tinggi atau tidak mempertimbangkan desa-desa yang paling membutuhkan karena faktor jarak dan aksesibilitas.

Jika masalah-masalah ini tidak ditangani dengan baik, beberapa dampak negatif dapat terjadi, seperti:

1. Rendahnya partisipasi Masyarakat

Jika lokasi pelayanan terlalu jauh atau sulit dijangkau, banyak penduduk yang memilih untuk tidak mengurus dokumen kependudukan mereka, yang dapat meningkatkan jumlah penduduk tanpa identitas resmi.

2. Ketidakpuasan Masyarakat

Ketidakmampuan Disdukcapil untuk menjangkau masyarakat secara merata dapat menimbulkan persepsi bahwa layanan publik tidak adil atau tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Ketimpangan antar wilayah

Desa-desa yang lebih dekat ke kantor UPT mungkin mendapatkan layanan yang lebih baik dibandingkan desa-desa yang jauh, sehingga memperlebar kesenjangan akses.

Berdasarkan tabel 1.2, telah didapati sampel data lokasi/desa didalam 1 kecamatan di Kabupaten Bogor yang masih belum tepat dan efektif sesuai dapat dilihat pada tabel 1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pelayanan.

Tabel 1. 2 Analisis data pada Pelayanan Administrasi Kependudukan

No	Nama Lokasi/Desa	Faktor	Keterangan
1	Desa Nanggung	Jumlah Penduduk	8958 Jiwa
		Jarak dari kantor	12,6 Kilometer
		Jumlah Akta Lahir	2271
		Jumlah KIA	97
2	Desa Sukaluyu	Jumlah Penduduk	7062 Jiwa
		Jarak dari kantor	6,5 Kilometer
		Jumlah Akta Lahir	2340
		Jumlah KIA	72
3	Desa Hambaro	Jumlah Penduduk	8246 Jiwa

No	Nama Lokasi/Desa	Faktor	Keterangan
		Jarak dari kantor	7,5 Kilometer
		Jumlah Akta Lahir	2518
		Jumlah KIA	143
4	Desa Kalongliud	Jumlah Penduduk	10156 Jiwa
		Jarak dari kantor	8,3 Kilometer
		Jumlah Akta Lahir	2606
		Jumlah KIA	138
5	Desa Batu Tulis	Jumlah Penduduk	8168 Jiwa
		Jarak dari kantor	8,5 Kilometer
		Jumlah Akta Lahir	2605
		Jumlah KIA	127
6	Desa Parakanmuncang	Jumlah Penduduk	7965 Jiwa
		Jarak dari kantor	9,8 Kilometer
		Jumlah Akta Lahir	2141
		Jumlah KIA	121
7	Desa Pangkaljaya	Jumlah Penduduk	8811 Jiwa
		Jarak dari kantor	13,2 Kilometer
		Jumlah Akta Lahir	1963
		Jumlah KIA	82
8	Desa Curugbitung	Jumlah Penduduk	11710 Jiwa
		Jarak dari kantor	17,1 Kilometer
		Jumlah Akta Lahir	2999
		Jumlah KIA	99
9	Desa Bantarkaret	Jumlah Penduduk	13103 Jiwa
		Jarak dari kantor	18,8 Kilometer
		Jumlah Akta Lahir	3203
		Jumlah KIA	115
10	Desa Cisarua	Jumlah Penduduk	11569 Jiwa
		Jarak dari kantor	19,1 Kilometer
		Jumlah Akta Lahir	3169
		Jumlah KIA	118
11	Desa Malasari	Jumlah Penduduk	9179 Jiwa
		Jarak dari kantor	23,6 Kilometer
		Jumlah Akta Lahir	2513
		Jumlah KIA	59

Dalam penelitian ini telah dilakukan pengamatan yang dinilai kurang tepat dalam penentuan lokasi pelayanan administrasi kependudukan pada tahun 2024 di

kecamatan nanggung, dengan lokasi/desa yang dipilih adalah Desa Nanggung dengan jumlah penduduk 8958 jiwa, jarak dari kantor UPT Disdukcapil adalah 12,6 KM, jumlah kepemilikan akta lahir 2271 dan jumlah kepemilikan KIA 97, sedangkan ada lokasi/desa dengan jumlah penduduk lebih banyak dan jarak dari kantor UPT lebih jauh serta lebih sedikit jumlah kepemilikan dokumen kependudukan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang sistematis serta memiliki dasar objektivitas untuk menentukan lokasi optimal dalam pelayanan administrasi kependudukan. Dalam penelitian ini dipilih metode TOPSIS sebagai solusi, karena mampu memberikan hasil yang lebih rasional dengan mempertimbangkan beberapa kriteria utama, seperti jumlah penduduk, jarak dari kantor UPT Disdukcapil, serta faktor pendukung lain yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelayanan.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa kendala utama yang menjadi penyebab belum optimalnya proses penentuan lokasi pelayanan administrasi kependudukan, yaitu sebagai berikut:

a. Ketidaktepatan dalam pemilihan lokasi pelayanan.

Lokasi atau desa yang selama ini dipilih sebagai tempat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya tepat sasaran. Pemilihan lokasi masih dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektif, seperti usulan dari pihak desa, tanpa analisis berbasis data. Hal ini menyebabkan pelayanan tidak selalu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di desa dengan jumlah penduduk besar, jarak jauh, dan tingkat kepemilikan dokumen kependudukan yang rendah.

b. Proses penetapan lokasi belum efektif dan terukur.

Proses penentuan lokasi pelayanan belum didukung oleh metode analisis yang sistematis. Penetapan dilakukan secara manual tanpa mempertimbangkan bobot antar kriteria seperti jumlah penduduk, jarak dari kantor UPT Disdukcapil, dan tingkat kepemilikan dokumen kependudukan. Akibatnya, efektivitas kegiatan pelayanan menjadi kurang optimal karena sumber daya belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menjangkau wilayah prioritas.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dirancang dari identifikasi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pernyataan Masalah (*Problem Statement*)

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada proses penentuan lokasi atau desa untuk pelayanan administrasi kependudukan, yang hingga kini dinilai kurang tepat sasaran dan kurang efektif dalam mendukung kebutuhan masyarakat.

b. Pertanyaan Penelitian (*Research Question*)

Dari fokus permasalahan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan sebagai dasar kajian, antara lain:

- 1) Bagaimana penerapan metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) dapat membantu pengambilan keputusan dalam menentukan lokasi pelayanan administrasi kependudukan?
- 2) Sejauh mana tingkat kesesuaian hasil sistem pendukung keputusan dalam menilai kelayakan lokasi pelayanan administrasi kependudukan?
- 3) Bagaimana implementasi metode TOPSIS dalam proses penetapan lokasi optimal untuk pelayanan administrasi kependudukan?
- 4) Seberapa efektif metode TOPSIS dalam meningkatkan akurasi dan ketepatan pemilihan lokasi pelayanan administrasi kependudukan?

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menerapkan metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) sebagai pendekatan dalam memberikan rekomendasi penentuan lokasi yang paling optimal bagi pelayanan administrasi kependudukan. Dengan penerapan metode ini diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih sistematis, objektif, dan terukur.

2. Tujuan Penelitian

Secara lebih rinci, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi:

- a. Mendapatkan hasil lokasi optimal untuk pelayanan administrasi kependudukan yang tepat.
- b. Mendapatkan hasil lokasi optimal untuk pelayanan administrasi kependudukan yang efektif
- c. Mengembangkan prototype aplikasi rekomendasi lokasi optimal untuk pelayanan administrasi kependudukan.
- d. Melakukan pengukuran tingkat akurasi serta efektivitas penerapan metode TOPSIS dalam menentukan lokasi pelayanan administrasi kependudukan,

sehingga dapat dijadikan acuan pada penelitian atau implementasi selanjutnya.

D. Spesifikasi Hasil

Berdasarkan hasil dari analisis, didapatkan beberapa spesifikasi hasil yang diharapkan di antara lain :

1. Penerapan metode TOPSIS mendapatkan hasil yang akurat dalam menentukan lokasi optimal untuk pelayanan administrasi kependudukan.
2. Sistem diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mencari lokasi optimal pelayanan administrasi kependudukan..
3. Sistem dirancang agar mudah digunakan, termasuk oleh pengguna awam, sehingga dapat membantu dalam menentukan lokasi optimal pelayanan administrasi kependudukan dengan kinerja yang baik.
4. Sistem mampu menghasilkan penentuan lokasi optimal pelayanan administrasi kependudukan secara akurat dan efektif.

E. Signifikansi Penelitian & Pengembangan

Penelitian ini memiliki nilai penting dalam upaya mengaplikasikan metode komputasi berbasis Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) untuk menentukan lokasi pelayanan administrasi kependudukan yang paling optimal. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan, khususnya mengenai penerapan metode TOPSIS dalam penentuan lokasi atau desa untuk pelayanan administrasi kependudukan.
2. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini dapat membantu UPT Disdukcapil dalam menentukan lokasi atau desa yang tepat untuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.
3. Manfaat kebijakan
Hasil penelitian dapat dijadikan dasar pertimbangan maupun rujukan dalam proses pengambilan keputusan, terutama bagi pihak yang berwenang dalam merumuskan kebijakan penentuan lokasi pelayanan administrasi kependudukan.

F. Asumsi dan Keterbatasan

Dalam penelitian ini, terdapat sejumlah asumsi yang digunakan sebagai dasar perancangan sistem maupun penerapan metode. Asumsi-asumsi tersebut antara lain:

1. Data jumlah penduduk yang diperoleh dari Disdukcapil adalah akurat.
2. Jarak dihitung berdasarkan rute jalan yang ada, bukan jarak garis lurus, untuk mencerminkan realitas di lapangan.

3. Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak berdasarkan Data Disdukcapil.
4. Semua desa memiliki fasilitas minimal untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan, seperti tempat berkumpul dan Listrik

Dalam Penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan baik dari sisi sistem yang dikembangkan maupun metode yang digunakan. Adapun keterbatasannya adalah:

1. Tidak mempertimbangkan faktor kualitatif seperti tingkat kepuasan masyarakat atau kondisi sosial-ekonomi yang mungkin memengaruhi kebutuhan layanan.
2. Data yang digunakan mungkin tidak mencerminkan perubahan mendadak, seperti bencana alam yang memengaruhi akses jalan.
3. Penelitian ini hanya memanfaatkan metode TOPSIS sebagai pendekatan utama. Metode ini belum dipadukan dengan teknik lain yang mungkin memberikan analisis lebih luas, sehingga rekomendasi yang dihasilkan masih bergantung sepenuhnya pada kemampuan TOPSIS dalam mengolah data multi-kriteria.

G. Definisi Istilah dan Definisi Operasional

Dalam suatu penelitian, penyusunan definisi istilah dan operasional menjadi hal yang penting agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam memahami istilah yang digunakan. Bagian ini menjelaskan istilah-istilah kunci serta definisi operasional yang relevan dengan penelitian, sehingga setiap konsep yang dipakai dapat dipahami secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan ialah Layanan yang dilakukan dengan mendatangi lokasi tertentu untuk mempermudah pengurusan dokumen seperti e-KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.
2. UPT Disdukcapil Wilayah IV ialah Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab atas layanan kependudukan di beberapa kecamatan Kabupaten Bogor.
3. Lokasi Optimal
Merupakan lokasi yang dipilih sebagai tempat paling strategis untuk penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, berdasarkan hasil analisis menggunakan metode TOPSIS dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan.
4. Kriteria Penentuan Lokasi
Adalah faktor-faktor yang menjadi dasar dalam menentukan lokasi pelayanan administrasi kependudukan. Kriteria tersebut dapat mencakup jumlah penduduk, jarak ke kantor kecamatan, tingkat kepadatan wilayah, serta tingkat kebutuhan masyarakat terhadap layanan.

5. Alternatif

Adalah pilihan lokasi desa/kelurahan yang menjadi kandidat tempat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, yang kemudian akan dipilih yang terbaik melalui proses analisis dengan metode TOPSIS.

6. Bobot Kriteria

Adalah nilai atau tingkat kepentingan yang diberikan pada setiap kriteria penentuan lokasi, yang menggambarkan seberapa besar pengaruh kriteria tersebut dalam proses pengambilan keputusan.

7. Nilai Preferensi (Ranking)

Adalah hasil akhir dari perhitungan metode TOPSIS berupa urutan prioritas alternatif, yang menunjukkan lokasi mana yang paling optimal untuk dipilih dalam pelayanan administrasi kependudukan.